



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2021-2026



Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis**



Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Utara. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Bappeda dan Litbang, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya, sehingga akuntabilitas kinerja Provinsi Kalimantan Utara dapat di capai secara optimal dan terpadu dalam rangka memperoleh predikat akuntabilitas kinerja baik.

Tanjung Selor, 15 September 2021
Kepala Badan,

Risdianto, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197205091997031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang	II-4
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7
2.4 Tatangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan....	II-11
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-6
3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.6 Penentuan Isu Strategis Bappeda dan Litbang.....	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Program dan Kegiatan	VI-1
BAB VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 260 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan di harmoniskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 adalah Bappeda dan Litbang. Bappeda dan Litbang mempunyai tugas menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Sesuai amanat Pasal 15 Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, atas dasar tersebut maka Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengintegrasikan antara sumber daya manusia khususnya bidang perencanaan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Disamping itu, demi

terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, maka Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 80);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 Nomor 16).

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5).
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen/aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda dan Litbang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya bidang perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;

4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Bappeda dan Litbang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

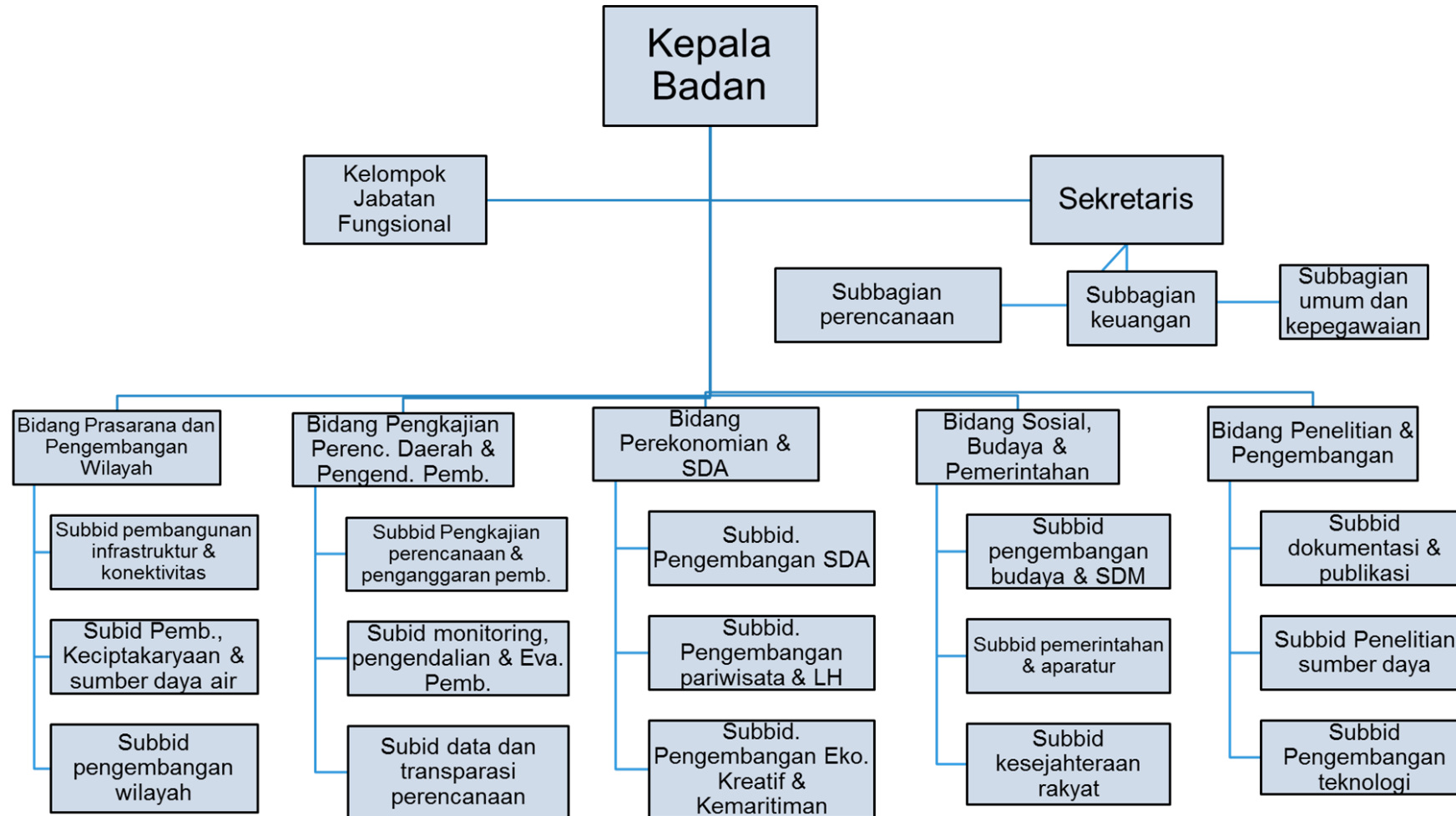
Berdasarkan Berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tugas pokok dari Bappeda dan Litbang adalah membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian perencanaan;
 - 2. Subbagian keuangan; dan
 - 3. Subbagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang pembangunan infrastruktur konektivitas;
 - 2. Subbidang pembangunan, keciptakaryaan dan sumberdaya air; dan
 - 3. Subbidang pengembangan wilayah
- d. Bidang pengkajian perencanaan daerah dan pengendalian pembangunan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang pengkajian perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - 2. Subbidang monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
 - 3. Subbidang data dan transparansi perencanaan.
- e. Bidang perekonomian dan sumberdaya alam, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang pengembangan sumberdaya alam;
 - 2. Subbidang pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup; dan
 - 3. Subbidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemaritiman.
- f. Bidang sosial, budaya dan pemerintahan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang pengembangan budaya dan sumberdaya manusia;
 - 2. Subbidang pemerintahan dan aparatur; dan
 - 3. Subbidang kesejahteraan rakyat.
- g. Bidang penelitian dan pengembangan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang dokumentasi dan publikasi;
 - 2. Subbidang penelitian sumberdaya; dan
 - 3. Subbidang pengembangan teknologi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA



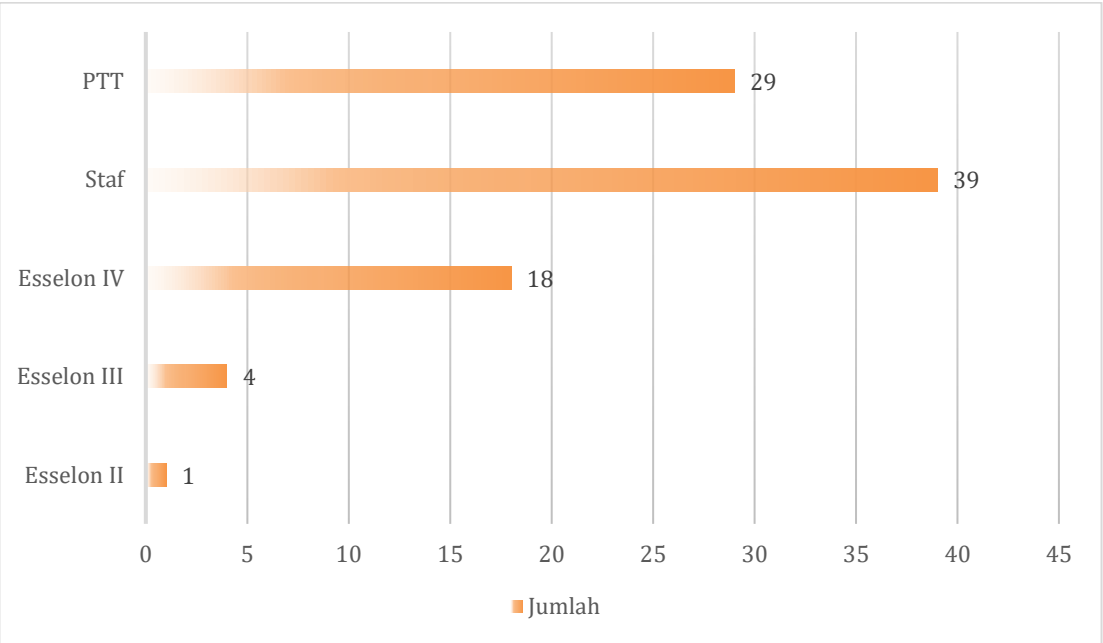
2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Bappeda Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebanyak 62 orang PNS. Dari jumlah 62 orang tersebut terdiri dari 23 orang pejabat struktural, dan pelaksana sebanyak 39 orang sedangkan tenaga kontrak berjumlah 29 orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

Berikut ini jumlah ASN dan Non ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara:

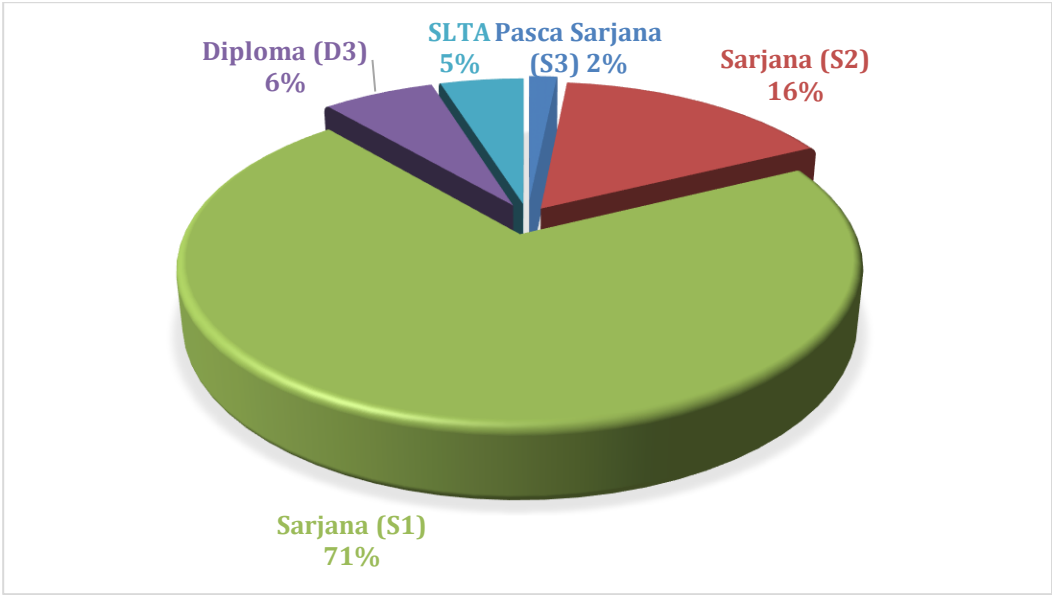


Gambar 2.2.
Jumlah ASN dan Non ASN di Lingkungan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

a. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan maka sumber daya aparatur yang ada di Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan

jumlah 62 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berikut personil Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sesuai tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara terbanyak adalah pegawai golongan III/a, secara lengkap komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/c	1
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	4
4.	Pembina	IV/a	3
5.	Penata Tingkat I	III/d	11
6.	Penata	III/c	3
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	7
8.	Penata Muda	III/a	24
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
10	Pengatur	II/c	2
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	Jumlah		62

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaiaan Bappeda dan Litbang

2.2.2 Perlengkapan/Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Tabel 2.2.
Data Sarana dan Prasarana Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana			
1	Kendaraan Dinas Bermotor R4	7 Unit	
2	Kendaraan Dinas Bermotor R2	20 Unit	
3	Kendaraan Dinas Pick Up R4	3 Unit	Double cabin
4	Lemari Es	3 Unit	
5	AC	1 Unit	
6	Filling Besi / Metal	22 Unit	2 Pemusnahan
7	Filing Kayu	10 Unit	
8	Brandkas	1 Unit	
9	Lemari Makan	1 Unit	
10	Lemari Besi	11 Unit	
11	Rak Kayu	2 Unit	
12	AF Generator Tone Generator	2 Unit	
13	Mesin Hitung / Jumlah Lain	1 Unit	
14	Alat Penghacur Kertas	6 Unit	
15	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	
16	Kipas Angin	4 Unit	1 unit rusak berat
17	Kompor Gas	1 Unit	
18	Tabung Gas	1 Unit	
19	Gorden / Tirai	44 Buah	
20	Peralatan Personal Komputer	9 Unit	
Sarana			
25	Kursi Depan Meja Kerja Pejabat	20 Buah	
26	Mikroskop dengan Kamera	8 Unit	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
27	TV Monitor	6 Unit	
28	Recorder	2 Unit	
29	Alat Olahraga Lainnya	1 Unit	
30	Aset Tetap Lainnya	1 Unit	
31	Camera + Attacment	3 Unit	
32	Proyektor + Attacment	6 Unit	
33	Compact Disc Player	1 Unit	
34	Microphone / Wireless Mic	1 Unit	
35	Power Supply (UPS)	9 Unit	
36	Peralatan Studio Visual Lain	1 Unit	
37	Mesin Jilid	1 Unit	
38	Mesin Press	1 Unit	
39	Faximile	2 Unit	
40	Wireless Amplifier	1 Unit	
41	Printer	87 Unit	
42	Note Book	63 Unit	2 Pemusnahan
43	Scanner	2 Unit	
44	Line Printer	2 Unit	1 Rusak
45	Peralatan Komputer Mainframe	2 Unit	
46	PC Unit	39 Unit	
47	Televisi	3 Unit	
48	Amplifiler	1 Unit	
49	Loundspeaker	1 Unit	
50	Tangga Aluminium	1 Unit	
51	Hard Disk	10 Unit	
52	Handycam	6 Unit	
53	Perkakas Kantor	1 Unit	
54	Whiteboard	3 Buah	
55	Camera Video	6 Unit	
56	HT	5 Unit	
57	Drone	2 Unit	
55	Mesin Absensi	1 Unit	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
56	Lemari Kayu	2 Buah	
57	Kursi Tamu	2 Set	
58	Mesin Ketik Manual	1 Unit	4 Rusak
59	Dispenser	4 Unit	
60	GPS	4 Unit	
61	Papan Nama Instansi	1 Unit	
62	Troly Dorong	1 Unit	
63	Plotter	1 Unit	
64	Papan Struktur Organisasi	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rata-rata Nilai Prestasi Kerja ASN (%)	88	82	83	84	86	88	82	83	83	-		100	100	98.81		
2	Persentase program Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (%)	100	65	70	100	100	100	93	89	89			143	127	89		
3	Persentase sasaran RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD. (%)	100	65	70	100	100	100	100	100	100			154	143	100		
4	Persentase program dan kegiatan APBD yang selaras dengan RKPD. (%)	100	60	65	100	100	100	98	99	99			163	152	99		
5	Rata-rata persentase capaian target kinerja Perangkat Daerah. (%)	90	60	70	75	85	90	61	87	87			102	124	116		
6	Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan RPJMD (%)	100	-	-	100	100	100	98	100	100					100		
7	Persentase realisasi keterisian database (%)	100	-	-	80	100	100	20	53	53					66.3		
8	Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD (%)	90	-	-	80	85	90	-	-	100		-	-	-	125		
9	Nilai LKjIP	BB	-	-	B	B	BB	CC	B	B		-	-	-	100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			100	100	100		
11	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			100	100	100		
12	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			100	100	100		

Dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2018 tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan lainnya perlunya melakukan perubahan beberapa sasaran, indikator kinerja dan target kinerja, berikut pencapaian strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD (%)	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
2	Persentase sasaran RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD (%)	100	-	-	80	100	100	-	-	100	100	100	-	-	125	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD (%)	100	-	-	80	100	100	-	-	98	100	102	-	-	123	100	102
4	Rata-rata persentase capaian target kinerja Perangkat Daerah. (%)	100	-	-	70	80	100	-	-	87	61	93	-	-	124	76	93
8	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100
10	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	100	100	100

Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Tahun 2017-2021

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	26,916,212	24,884,205	16,712,357	17,591,954	14,808,393	18,529,825	22,089,115	20,201,813	15,414,626	14,733,625	68.84	88.77	120.8	87.62	99.49	(0,13)	(0,17)
Belanja Tidak Langsung	5,902,388	6,697,524	5,153,578	4,415,464	9,428,239	5,125,856	15,843,217	15,452,978	4,305,367	9,503,240	86.84	236.5	299.8	97.51	100	0,22	(2,55)
Total Anggaran	32,818,601	31,581,730	21,865,936	22,007,419	24,236,633	23,655,681	37,932,333	35,654,792	19,719,993	24,236,865	72.08	120.1	163.1	89.61	100	(0,06)	(0,33)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda dan Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dan Litbang dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
3. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Keterpaduan perencanaan antar Kabupaten/Kota;
2. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;

Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis gambaran umum Bappeda dan Litbang, maka dirumuskan permasalahan pembangunan Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- 1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Belum dijadikan Bahan Pertimbangan Kebijakan Perencanaan Berikutnya
- 3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Dari hasil analisis capaian kinerja disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang adalah Belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan daerah. Keterkaitan antara masalah pokok dan akar masalah dalam pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 3.1.
Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum optimalnya Implementasi perencanaan pembangunan daerah	Kurang optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Masih terdapatnya Kegiatan dan sub kegiatan teknis yang tidak mengungkit kinerja perangkat daerah 2) Ketersediaan dan keakuratan data perencanaan belum memadai 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang urusan dan sub bidang urusan 4) Kurang tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan
	Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi program	1) Masih terbatasnya hasil monitoring program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	pembangunan daerah	2) Pelaksanaan kegiatan monitoring program, kegiatan dan sub kegiatan belum optimal 3) Kurang tersedianya data dan informasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PD yang terupdate
Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Kualitas inovasi daerah belum optimal	1) Masih terbatasnya inovasi daerah yang masuk nominasi tingkat nasional 2) Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan inovasi daerah 3) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah
	Kualitas penelitian dan pengembangan belum optimal	1) Masih terbatasnya jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan 2) Masih rendahnya minat pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 3) Masih rendahnya sumberdaya peneliti

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi sebagai rumusan umum yang menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;

- 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
- 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
- 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Maka Bappeda dan Litbang secara umum berkontribusi terhadap pencapaian Misi kedua yaitu: **Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.**

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan telaahan bagi Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi Kedua : Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.			
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Indeks RB	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.	Predikat SAKIP

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Analisis Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara terhadap sasaran dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020–2024 Terdapat tiga tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama:

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Sasaran Strategis dari tujuan kedua:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, yang diukur dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L. Dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan Ketiga:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, yang diukur dari indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara 2015-2035 maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappeda dan Litbang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan rencana penataan ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappeda dan Litbang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Kalimantan Utara.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda dan Litbang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
- c. Peningkatan kualitas inovasi daerah
- d. Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka keterkaitan rumusan tujuan, sasaran dan indikator dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	95%	95%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya fungsi penyelenggara an kelitbangan	Persentase inovasi daerah yang telah diimplement asikan	80%	85%	90%	95%	100 %
			Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	90%	95%	100 %

Tujuan sebagaimana tersebut diatas diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, serta

selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasaran.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Bappeda dan Litbang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pengembangan inovasi daerah

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda dan Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Bappeda dan Litbang.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA	
Misi	:	Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD
			Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan inovasi daerah
		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.

1. Program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Bappeda dan Litbang.
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda dan Litbang.

Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Bappeda dan Litbang sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat, yang tercantum pada **lampiran 6.1**.

Tabel VI.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi						
						Realisasi	Target	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21						
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
		5 01					PERENCANAAN																				
		5 01 01							23.802.152.279		24.497.245.101		25.801.632.282		26.983.539.101		28.367.681.197		129.452.249.960								
		5 01 01							22.078.136.037		22.803.503.761		24.366.211.323		25.484.276.547		26.988.116.528		121.720.244.196								
		5 01 01				%	100	100	100		14.112.459.892	100	14.475.842.650	100	15.222.025.413	100	15.460.971.544	100	16.317.467.954	100	75.588.767.452						
		5 01 01 1 01				%	100	100	100		431.598.567	100	448.059.755	100	463.083.584	100	466.836.405	100	494.387.934	100	2.303.966.246	Sekretariat					
		5 01 01 1 01 01					Jumlah Dokumen perencanaan PD yang disusun	Dok	3	3	2	145.821.320	3	159.149.449	2	170.773.555	2	170.420.807	3	196.198.278	12	842.363.408	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 01 06					Jumlah laporan perangkat daerah yang disusun	Dok	17	17	17	85.777.247	17	88.910.307	17	92.310.030	17	96.415.598	17	98.189.656	85	461.602.838	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 01 07					Jumlah PD yang di evaluasi	PD	40	41	41	200.000.000	41	200.000.000	41	200.000.000	41	200.000.000	41	200.000.000	41	1.000.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 02				%	100	100	100		9.064.118.412	100	9.512.885.964	100	10.152.857.065	100	10.234.056.425	100	11.105.458.129	100	50.069.375.995	Sub Bagian Keuangan					
		5 01 01 1 02 01					Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	58	62	65	8.215.326.818	70	8.580.216.849	75	9.026.674.704	80	9.099.551.103	85	9.785.789.151	85	44.707.558.625	Sub Bagian Keuangan	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 02 02					Jumlah pengelola administrasi kegiatan dan keuangan yang dibayarkan haknya	Orang	34	34	34	780.169.797	34	857.984.458	34	1.044.949.534	34	1.045.417.308	34	1.224.425.012	170	4.952.946.110	Sub Bagian Keuangan	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 02 07					Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	13	13	13	68.621.798	13	74.684.658	13	81.232.826	13	89.088.013	13	95.243.966	65	408.871.261	Sub Bagian Keuangan	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 05				%	100	100	100		340.535.671	100	298.738.630	100	325.854.404	100	517.510.724	100	387.849.142	100	1.870.488.572	Sekretariat					
		5 01 01 1 05 02					Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stel	0	65	65	66.048.480		-		-	80	160.893.530		-	145	226.942.010	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 05 09					Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	15	65	30	145.821.320	35	158.704.897	40	173.081.305	45	189.818.209	50	206.198.278	200	873.624.010	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 05 11					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	4	15	10	128.665.871	15	140.033.733	20	152.773.099	25	166.798.985	30	181.650.864	100	769.922.552	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06				%	100	100	100		2.464.947.454	100	2.365.975.542	100	2.711.560.963	100	2.558.913.469	100	2.663.764.193	100	12.765.161.621	Sekretariat					
		5 01 01 1 06 01					Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	8	8	8	5.793.270	8	5.779.170	8	6.277.082	8	6.941.923	8	7.364.224	40	32.155.669	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 02					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis	20	23	25	274.829.216	27	284.512.981	28	310.161.699	30	339.382.906	32	363.301.728	142	1.572.188.530	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 03					Jumlah peralatan rumah yang disediakan	Jenis	0	0	15	185.232.014	17	186.711.644	19	203.543.615	21	223.226.214	24	238.600.864	24	1.037.314.351	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 04					Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	102	106	102	321.800.659	102	306.740.558	104	334.162.307	106	366.475.689	107	391.879.827	521	1.721.059.040	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 05					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	10	11	11	189.282.778	11	190.268.056	11	206.774.466	11	226.576.656	11	260.202.589	11	1.073.104.546	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 06					Jumlah bahan cetakan yang disediakan	eks	365	730	365	2.028.291	365	2.667.309	365	2.907.766	365	3.181.715	365	3.583.922	1.825	14.369.003	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 09					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Kali	150	150	150	1.485.981.226	150	1.211.475.211	150	1.647.734.027	150	1.200.297.169	150	1.202.451.726	750	6.747.939.360	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 06 11					Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	aplikasi	4	4	-	-	4	177.820.613	-	-	4	192.831.197	4	196.379.312	4	567.031.122	Sekretariat	Tanjung Selor			
		5 01 01 1 07				%	100	100	100		40.751.043	100	89.088.127	100	44.779.595	100	101.139.963	100	52.433.276	100	328.192.005	Sekretariat					
		5 01 01 1 07 02					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang sediakan	Unit	20	22	-	-	2	48.011.566		-	2	52.064.423		-	26	100.075.989	Sekretariat	Tanjung Selor			

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Realisasi	Target	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	8	Target	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Target	20	21	21
		5 01 01 1 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang sediakan	Unit	3	22	1	40.751.043	1	41.076.562	1	44.779.595	1	49.075.540	1	52.433.276	5	228.116.016	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	1.199.340.273	100	1.184.778.024	100	1.308.345.883	100	1.347.260.498	100	1.362.013.380	100	6.401.738.057	Sekretariat	
		5 01 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail yang disediakan	Buah	700	700	700	9.724.681	700	10.224.685	700	11.077.204	700	13.016.106	700	14.482.974	3500	58.525.650	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah akun layanan komunikasi dan listrik yang dibayarkan	Akun	2	4	4	83.965.672	4	85.353.894	4	92.310.030	4	101.236.378	4	108.254.096	4	471.120.070	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum yang dibayarkan	Orang	40	40	40	1.105.649.920	40	1.089.199.445	40	1.204.958.650	40	1.233.008.014	40	1.239.276.310	40	5.872.092.338	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 09 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	571.168.471	100	576.316.607	100	215.543.919	100	235.254.060	100	251.561.899	100	1.849.844.956	Sekretariat	
		5 01 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	Unit	25	25	25	416.412.681	25	419.834.468	25	45.693.465	25	49.654.033	25	53.096.057	25	984.690.702	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	Unit	5	7	7	109.049.791	9	110.248.780	9	120.003.038	11	131.607.292	11	140.730.325	11	611.639.226	Sekretariat	Tanjung Selor
		5 01 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	30	30	45.705.999	32	46.233.359	34	49.847.416	36	53.992.735	38	57.735.518	170	253.515.028	Sekretariat	Tanjung Selor
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	%			80	4.643.284.536	85	4.707.334.059	90	5.124.092.096	95	5.574.611.560	100	6.143.307.948	100	26.192.630.199		
		5 01 02 1 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persen	100		100	2.917.522.546	100	2.943.820.250	100	3.209.204.332	100	3.519.533.309	100	3.763.507.772	100	16.353.588.208	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	
		5 01 02 1 01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen yang ditelaah	Dok	2	3	2	370.196.367	2	373.423.288	2	407.087.230	3	446.452.428	3	477.400.563	12	2.074.559.876	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Partisipan yang hadir dalam konsultasi publik	Orang	173	180	185	182.482.424	190	186.711.644	195	203.543.615	200	223.226.214	205	238.700.281	975	1.034.664.179	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam forum	PD	40	41	41	117.947.862	41	120.028.914	41	130.849.467	41	143.502.566	41	153.450.181	41	665.778.990	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Partisipan yang hadir dalam musrenbang	Orang	125	130	135	419.700.719	140	422.323.956	145	460.396.272	150	504.916.437	155	539.917.303	725	2.347.254.688	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	Dok	2	3	2	1.827.195.174	2	1.841.332.449	2	2.007.327.747	3	2.201.435.664	3	2.354.039.443	12	10.231.330.476	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah	Persen	100		100	673.017.330	100	686.387.567	100	798.481.756	100	877.381.945	100	1.050.629.321	100	4.085.897.918	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	
		5 01 02 1 02 02	Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	Persen	85	90	92	310.228.984	94	312.075.176	96	360.009.115	98	385.662.393	99	422.215.521	99	1.790.191.191	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5 01 02 1 02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah profile tematik yang dianalisis	Data		7	7	362.788.345	7	374.312.391	7	438.472.640	7	491.719.552	7	628.413.799	7	2.295.706.727	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi					
						Realisasi	Target	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	4			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21			
		5	01	02	1	03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	1.052.744.661	100	1.077.126.243	100	1.116.406.008	100	1.177.696.306	100	1.329.170.856	100	5.753.144.074	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan		
		5	01	02	1	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian	Dok	3	3	3	303.336.872	3	300.090.956	3	311.565.735	3	325.422.892	3	372.650.365	15	1.613.066.819	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5	01	02	1	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Program yang di monitoring dan evaluasi	Dok	66	99	66	144.059.494	66	182.747.951	66	207.923.652	66	217.460.484	66	250.918.678	330	1.003.110.260	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5	01	02	1	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program yang di monitoring dan evaluasi	Program	122	122	78	409.103.127	78	389.001.262	78	383.780.886	78	412.197.798	78	453.361.259	390	2.047.444.333	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5	01	02	1	03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kab/Kota yang difasilitasi/dievaluasi	Dok	10	15	10	196.245.168	10	205.286.074	10	213.135.735	10	222.615.132	10	252.240.554	50	1.089.522.663	Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	Tanjung Selor
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%		100	100	3.322.391.609	100	3.620.327.052	100	4.020.093.814	100	4.448.693.444	100	4.527.340.626	100	19.938.846.544			
		5	01	03	1	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	1.296.038.373	100	1.431.455.935	100	1.661.580.532	100	1.870.462.608	100	2.140.534.504	100	8.400.071.952			
		5	01	03	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang dikoordinasikan	Program	34	40	40	7.779.745	40	44.455.153	40	55.386.018	40	62.670.139	40	68.732.759	40	239.023.814	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pemerintahan yang di asistensi	Kegiatan	58	80	80	26.736.255	80	44.455.153	80	73.848.024	80	81.953.259	80	88.370.691	80	315.363.382	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	9	11	11	122.336.483	11	489.006.686	11	553.860.177	11	626.701.389	11	687.327.593	11	2.479.232.329	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah program pada urusan bidang pemerintahan yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	34	40	40	481.696.151	40	44.455.153	40	55.386.018	40	77.132.479	40	98.189.656	40	756.859.457	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan	Program	54	72	72	9.780.250	72	71.128.245	72	92.310.030	72	96.415.598	72	117.827.587	72	387.461.711	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan pada urusan bidang pembangunan manusia yang di asistensi	Kegiatan	157	233	233	37.217.557	233	71.128.245	233	92.310.030	233	96.415.598	233	117.827.587	233	414.899.018	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah urusan bidang pembangunan manusia yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	6	11	11	104.637.565	11	133.365.460	11	138.465.044	11	154.264.957	11	176.741.381	11	707.474.407	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program pada urusan bidang pembangunan manusia yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	54	72	72	505.854.366	72	533.461.839	72	600.015.192	72	674.909.188	72	785.517.249	72	3.099.757.836	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	100	100	1.005.308.671	100	1.054.965.569	100	1.143.156.412	100	1.251.785.108	100	989.538.979	100	5.444.754.739			

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
										Realisasi	Target	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	4					5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	
		5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang perekonomian yang dikoordinasikan	Program	0	45	47	177.563.470	47	177.820.613	47	184.620.059	47	192.831.197	47	19.637.931	47	752.473.270	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pada urusan bidang perekonomian yang di asistensi	Kegiatan		108	116	70.871.034	116	71.437.151	116	77.877.177	116	85.407.874	115	91.328.357	115	396.921.594	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah urusan bidang perekonomian yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	8	8	8	92.615.687	8	93.355.499	8	101.771.455	8	111.612.719	8	119.349.725	8	518.705.086	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pada urusan bidang perekonomian yang di asistensi	Kegiatan		108	116	162.471.787	116	163.769.609	116	178.533.366	116	195.797.481	116	209.370.186	116	909.942.429	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang dikoordinasikan	Program	0	35	36	145.914.045	36	177.820.613	36	184.620.059	36	192.831.197	36	19.637.931	36	720.823.845	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang di asistensi	Kegiatan	0	93	114	107.254.569	114	113.259.474	114	126.997.473	114	144.583.918	114	161.968.706	114	654.064.139	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Sumber Daya Alam yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	0	9	9	73.791.331	9	77.922.717	9	87.374.484	9	99.473.988	9	111.434.753	9	449.997.273	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah program pada urusan bidang Sumber Daya Alam yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	0	35	36	174.826.747	36	179.579.894	36	201.362.339	36	229.246.734	36	256.811.389	36	1.041.827.102	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	1.021.044.565	100	1.133.905.547	100	1.215.356.870	100	1.326.445.728	100	1.397.267.143	100	6.094.019.853		
		5	01	03	1	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	Program	15	15	15	132.974.219	15	133.365.460	15	138.465.044	15	159.085.737	15	162.012.933	15	725.903.393	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Infrastruktur yang di asistensi	Kegiatan	47	47	47	37.046.403	47	31.118.607	47	32.308.510	47	33.745.459	47	34.366.380	47	168.585.359	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Infrastruktur yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	2	2	2	138.924.010	2	146.702.006	2	167.542.704	2	192.493.742	2	215.639.213	2	861.301.675	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program pada urusan bidang Infrastruktur yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	15	15	15	436.915.086	15	440.405.156	15	480.107.485	15	526.533.716	15	563.033.095	15	2.446.994.539	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah program pada urusan bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	Program	5	5	5	9.678.373	5	17.782.061	5	18.462.006	5	19.283.120	5	19.637.931	5	84.843.491	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan pada urusan bidang Kewilayahan yang di asistensi	Kegiatan	23	23	23	6.774.861	23	17.782.061	23	18.462.006	23	19.283.120	23	19.637.931	23	81.939.979	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor
		5	01	03	1	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah urusan bidang Kewilayahan yang di monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaanya	PD	3	3	3	21.338.728	3	35.564.123	3	36.924.012	3	38.566.239	3	39.275.862	3	171.668.964	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi				
										Realisasi	Target	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	4					5	6	7	8	8	Target	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	
		5	01	03	1	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah program pada urusan bidang Kewilayahan yang disinergikan dan harmonisasi dalam dokumen perencanaan	Program	5	5	5	237.392.886	5	311.186.073	5	323.085.103	5	337.454.594	5	343.663.797	5	1.552.782.453	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wialyah	Tanjung Selor	
		5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.724.016.242		1.693.741.340		1.435.420.959		1.499.262.554		1.379.564.669		7.732.005.764				
	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	%			80	1.724.016.242	85	1.693.741.340	90	1.435.420.959	95	1.499.262.554	100	1.379.564.669	100	7.732.005.764			
		5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan			100	758.312.635	100	626.817.661	100	650.785.708	100	294.067.575	100	299.478.451	100	2.629.462.031				
		5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembagan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Tema Penelitian	-	-	1	69.462.005	1	66.682.730	1	69.232.522	1	72.311.699	1	73.642.242	5	351.331.198	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian dan pengembagan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	Tema Penelitian	-	-	1	69.462.005	2	133.365.460	2	138.465.044	2	144.623.398	2	147.284.484	9	633.200.391	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah penelitian dan pengembagan Bidang Ketatalaksanaan Desa yang difasilitasi	Tema Penelitian	-	-	1	92.616.007	1	88.910.307	1	92.310.030	0	-	0	-	3	273.836.343	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis data kelitbangan yang dikelola	Jenis	2	2	2	130.385.741	2	133.365.460	2	138.465.044		-		-	10	402.216.245	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah kajian/penelitian yang menghasilkan rumusan rekomendasi	Rekomendasi	3	1	1	309.626.425	1	133.365.460	1	138.465.044		-		-	7	581.456.929	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	86.760.452	1	71.128.245	1	73.848.024	1	77.132.479	1	78.551.725	5	387.420.925	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	Persen		100	100	231.540.017	100	177.820.613	100	184.620.059	100	192.831.197	100	245.474.140	100	1.032.286.026			
		5	05	02	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian Bidang Aspek - Aspek Sosial	Tema	-	-	1	138.924.010	2	177.820.613	2	184.620.059	2	192.831.197	1	98.189.656	8	792.385.535	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Penelitian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tema	-	-	1	92.616.007	-	-	-	-	-	1	147.284.484	2	286.208.494	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor		
		5	05	02	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya	Persen		100	100	138.924.010	100	133.365.460	100	92.310.030	100	192.831.197	100	-	100	557.430.696			
		5	05	02	1	03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tema	-	-	-	-	1	133.365.460		-	1	192.831.197	-	-	2	326.196.657	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	
		5	05	02	1	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Tema	-	-	-	-	-	1	92.310.030	-	-	-	-	1	92.310.030	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor		
		5	05	02	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian Bidang Lingkungan Hidup	Tema	-	-	1	138.924.010	-	-	-	-	-	-	-	1	138.924.010	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor		
		5	05	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	%		75	80	595.239.580	85	755.737.606	90	507.705.162	95	819.532.586	100	834.612.077	100	3.512.827.011			
		5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang dilakukan pembinaan	Inovasi	1	1	1	277.848.020	1	266.730.920	-	-	1	289.246.795	1	294.568.968	6	1.128.394.704	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Selor	

[illegible]

BAB VII
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran (IKU):							
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd tahun berkenaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian program dalam RKPd tahun berkenaan		95%	95%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah		80%	85%	90%	95%	100%	100%
II	INDIKATOR PROGRAM (IKK):							
1	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata capaian program pembangunan daerah		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase hasil penelitian yang		80%	85%	90%	95%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan							
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Rata-rata capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rata-rata capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rata-rata capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rata - rata capaian tahapan penyusunan perencanaan dan pendanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
9	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang pembangunan dan perencanaan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rata- rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
15	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan rekomendasinya		100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan		80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu, untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra, maka diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda dan Litbang.

Perencanaan yang baik perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai sehingga akan dapat mewujudkan Bappeda dan Litbang sebagai organisasi perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan secara optimal dan terpadu.

Tanjung Selor, 15 September 2021
Kepala Badan,

Risdianto, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197205091997031008



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**